ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK BTN SYARIAH

Rohman dan Asti Marlina

Universitas Ibn Khaldun Bogor

ABSTRAK

Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepadamasyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sistem dari pembiayaan mudharabah ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai mudharib (pengelola). Sedangkan keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi ini merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang bernafaskan Islam yang sesuai dengan misinya yakni berupaya meningkatkan kesejahteraan para anggota dan mewujudkan masyarakat dalam perekonomian yang maju, adil dan makmur

Kata Kunci : Akad , Mudharabah dan Pembiayaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain bank syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah Baitul Maal Wa Tamwil atau yang sering disebut dengan

BMT. Keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

Pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga di tinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang

dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memeralat dan memakan harta orang lain.

Dalam operasionalnya, pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan mudharabah ini merupakan akad kerja sama usaha. antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai mudharib (pengelola). Sedangkan keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dasar perjanjian mudharabah adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh mudharib, shahibul maal (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh mudharib. *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang

berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Sejak awal pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya.

Begitu juga yang dirasakan oleh para pengusaha-pengusaha kecil yang tinggal di sekitar Rembang dan tergolong ekonomi ke bawah. Dengan adanya KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi sangat diharapkan dapat membantu kebutuhan ekonomi dalam pengembangan usaha-usahanya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)”**

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui realisasi akad pembiayaan mudharabah pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi.

2. Untuk mengetahui apakah dengan adanya akad pembiayaan mudharabah pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan tehnik dan cara tertentu. Langkah langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara maupun data tertulis (dokumen).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan

antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban).¹⁵

c) Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumen adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan katakata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

2.1. Tinjauan Tentang Akad Pembiayaan Mudharabah

2.1.1. Pengertian Akad

Sedangkan pengertian Akad, menurut Kesepakatan Ahli Hukum Islam (*Fuqaha'*) mendefinisikan, akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* yang sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat-akibat hukum pada obyeknya. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dijalankan.

2.1.2. Syarat-syarat Akad.

Menurut T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus di penuhi (syarat), yaitu :

1. Dua *aqid* yang di namakan *Tharafyil aqdi* atau *aqidain* sebagai subyek perikatan/para pihak (*the contracting parties*).
2. *Mahallul aqdi (ma'qud alaih)*, yaitu sesuatu yang di akadkan sebagai obyek perikatan (*the object matter*).
3. *Maudhu' al-Aqdi (ghayatul akad)* yaitu cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (*the subject matter*).
4. *Shighat al-aqd* sebagai rukun akad (*a formation*).

2.1.3. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Sehingga dapat dikatakan pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya. Kegiatan pembiayaan (financing) pada lembaga keuangan syariah, menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik masalah usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi dalam dua kelompok:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksinya, maupun secara kualitatif yaitu masalah peningkatan kualitas atau mutu hasil dari produksi.

2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal investasi serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan masalah tersebut.

2.1.4. Pengertian Akad Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, akad mudharabah adalah akad kerja sama antara

dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

1, Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Disini, si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usahanya.

2.1.5. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Mudharabah

1) Manfaat pembiayaan Mudharabah:

- a. Bank atau lembaga keuangan syariah akan menikmati peningkatan

bagi hasil pada saat keuntungan dari usaha anggota meningkat.

- b. Bank atau lembaga keuangan tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tepat, tetapi disesuaikan dengan pendapatan hingga pihak bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

.Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak membebankan nasabah.

Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan *al-mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga.

2) Resiko pembiayaan *al-Mudharabah*

- a. *Side streaming*, anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Karena lalai dan kesalahan yang disengaja oleh si *mudharib*.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika anggotanya tidak jujur

2.2. Produk Pembiayaan Dana BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Pembiayaan merupakan aktivitas terpenting bagi BMT, karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggotanya untuk menggunakan

dana yang telah dikumpulkan pihak Lembaga keuangan dari anggotanya.

Adapun jenis-jenis produk pembiayaan dana BMT (*baitul wa tamwil*) yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut :

- a) Pembiayaan dengan prinsip kerja sama
Yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT yang menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Sistem pembiayaan tersebut dapat diterapkan dalam dua akad pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

2) Pembiayaan *musyarakah*

Yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak yakni BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya. Dalam

hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota.

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli adalah sistem yang menetapkan tata cara jual beli, dimana bank membeli terlebih dulu barang yang dibutuhkan masyarakat yang kemudian pihak lembaga keuangan Syariah menjualnya kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan. Adapun produk dari pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pembiayaan *al-Istisna*

Yaitu jual beli barang dalam bentuk pesanan dan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran, yang cara pembayaran di akhir sesuai dengan kesepakatan.

2) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah suatu akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran, hanya saja

proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo.

2.3. Program Kerja KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi pada Sektor

Pembiayaan

KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi merupakan salah satu jenis BMT yang kegiatan pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat disekitarnya baik yang berupa jasa simpanan maupun jasa pinjaman dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan usaha mereka. Sehingga BMT Ummat Sejahtera Abadi juga dapat memberikan pelayanan pinjaman modal/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya. Adapun Pelayanan anggota BMT Ummat Sejahtera Abadi dapat dilakukan diwilayah kerja yang benar-benar sebagai pelaku ekonomi atau UMKM (usaha mikro kecil menengah). Seiring dengan perjalanan waktu sampai saat ini, lembaga ini ternyata mendapat dukungan dan partisipasi dari semua pihak hingga usahanya semakin nampak baik, selain diberikan tambahan modal kerja secara intensif telah diadakan pembinaan bahkan pengawasan di semua sentra usaha. Adapun sentra-sentra pembiayaan yang diberikan KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi, antara lain:

a) Pembiayaan Perdagangan (56 %)

Pembiayaan dibidang perdagangan termasuk pembiayaan yang diberikan

kepada anggota yang menjalankan usaha dibidang dagang. Pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan yang paling banyak dijalankan oleh pihak KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi, karena banyak dari mereka adalah para pedagang kecil yang ingin meningkatkan usahanya agar bertambah maju dan berkembang. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan kepada mereka, diharapkan dapat membantu para pedagang demi kemajuan usahanya.

Sehingga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang dalam menjalankan progam kerjanya terutama yang berkaitan dengan akad pembiayaan mudharabah yang mereka realisasikan. Apakah progam kerja yang telah dilaksanakan pihak KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat ataukah tidak, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan mengadakan wawancara hanya ke beberapa anggota yang menjalankan pembiayaan mudharabah demi kemajuan usahanya.

Berdasarkan data-data dan wawancara dari pihak KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang dari tahun ke tahun, kondisi para pedagang yang mengajukan pembiayaan dari periode 2009 sampai 2011 menunjukkan adanya perkembangan

positif selama periode ini, kontribusi para anggota terhadap produk pembiayaan tersebut rata-rata mencapai 50% lebih. Secara sektoral aktivitas pembiayaan ini meliputi banyak sektor, akan tetapi yang lebih mendominasi dalam KJKS-BMT ummat Sejahtera Abadi ini adalah sektor perdagangan.

b) Pembiayaan Pertanian (23 %)

Pembiayaan disektor pertanian merupakan jenis pembiayaan yang diberikan oleh KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi kepada anggotanya atau masyarakat yang memiliki usaha disektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi sampai era sekarang ini. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, mereka lebih menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian tersebut. Maka dengan adanya produk pembiayaan yang modal tersebut, para petani dapat menggunakannya untuk membeli benih padi yang berkualitas, alat-alat pertanian, dan lain-lain yang berkaitan dengan pertanian.

c) Pembiayaan Industri (12 %)

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan pihak KJKSBMT Ummat Sejahtera Abadi kepada anggota yang mempunyai usaha dibidang industri. Dengan modal tambahan yang diberikan pihak BMT, diharapkan dapat digunakan

oleh para anggota untuk meningkatkan usahanya. Karena bidang industri tersebut memiliki peluang besar yang nantinya bias menjadi asset dalam memenuhi kebutuhan hidup.

d) Pembiayaan Nelayan (9 %)

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan pihak KJKSBMT Ummat Sejahtera Abadi kepada anggotanya atau masyarakat yang sedang menjalankan usaha dibidang nelayan. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan pihak BMT, diharapkan dapat digunakan oleh para anggota untuk meningkatkan usahanya. Karena dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini, pihak nelayan lah yang banyak mengalami kemajuan baik dari segi usahanya maupun kehidupan sehari-hari.

BAB III

ANALISIS DATA DAN

PEMBAHASAN

3.1. Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi

Perkembangan Bank Syari'ah berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 13 menetapkan bahwa eksistensi dari perbankan syariah benar-benar telah diakui. Hal ini tampak pada bank-bank syariah yang menjalankan

usahanya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan yang sering disebut dengan akad. Salah satunya adalah akad pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Kemudian keuntungan usaha tersebut di bagi menurut kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak.

Dalam lembaga keuangan syariah pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi juga menjalankan akad pembiayaan. Keberadaan BMT Ummat Sejahtera Abadi merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam dan masyarakat disekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. BMT Ummat Sejahtera Abadi merupakan Lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.

Dalam masa krisis ekonomi yang sempat melanda masyarakat di Indonesia pada

tahun 1997, para pengusaha dan pedagang kecil ke bawah mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi yang lebih besar untuk dapat mengembangkan kembali perekonomiannya.

Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai proses sangat baik dalam pengembangan ekonomi. Namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relative terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama.

3.2. Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Sebagaimana uraian di atas, KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad pembiayaan mudharabah dengan tujuan untuk memberdayakan umat dan anggotanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola Ekonomi Syariah. Yang mana, yang menjadi sasaran pengembangan pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi ini adalah para pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan modal agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah.

KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang mempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Karena dengan adanya BMT Ummat Sejahtera Abadi masyarakat- masyarakat kecil di sekitarnya, khususnya para pedagang yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya, dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikan bunga yang terlalu tinggi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk BMT yang

pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga dengan adanya produk pembiayaan khususnya pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat memperlancar perekonomian masyarakat dan mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan, sehingga dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya. Selain itu, dengan adanya BMT juga dapat mengubah pandangan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang berdasarkan dengan prinsip syariah.

2. Berdirinya KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi para masyarakat disekitar Rembang, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya. Sehingga adanya Pembiayaan dengan sistem *mudharabah* yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal, mereka tidak perlu

4.2.Saran

1. Bagi KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang Bagi KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil ke bawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah.
2. Dari pihak BMT juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah simpan pinjam syariah sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, idealisme produk-produk pada BMT yang berdasarkan operasional Syari'at Islam harus terus dipertahankan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, karena hal tersebut yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka

Setia, 2002.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*,
Yogyakarta : UII Press, Edisi Revisi, 2000.

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002.

Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia, 2008.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, 2008.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Hadits Bulughul Maram Min Adillat Al Ahkam*, 773 Hijriah.